

## MENAKAR POTENSI INDONESIA UNTUK TERHINDAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (Berdasarkan Data Makro Ekonomi Indonesia Tahun 1970-2020)

Agus Prianto<sup>1</sup>, Masruchan<sup>2</sup>, Alim Mustofa<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Magister Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang

<sup>1</sup>Email : agustkip@gmail.com

URL: <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2509>

DOI : <https://doi.org/10.32682/jpekbm.v6i1.2509>

### Abstract

*Based on the results of studies by experts and various international financial institutions, it is revealed that only around 10% of middle-class income countries are able to upgrade to high-income countries. This means that most middle-income countries have been caught in the middle-income trap. The IPC is the main measure to determine the extent to which a country can avoid the middle-income trap. This study aims to measure Indonesia's opportunities to avoid the middle-income trap. For this reason, this study analyzes 4 main macroeconomic variables that have interdependence relationships, namely: economic growth, population growth, GDP, and IPC. Data on 4 macroeconomic variables released by the World Bank from 1970-2020 were analyzed to describe various trends, developments, and changes that occurred in the Indonesian economy. The results of the analysis are then used as a basis for projecting the performance of the Indonesian economy in the future. From the results of the analysis of Indonesia's macroeconomic performance that has been running, this study has succeeded in projecting the amount of GDP and IPC in the coming year. The results of this study offer scenario 2 and scenario 3 as discussed in the discussion of this article. Indonesia's GDP is projected to enter the top 10 in the world by 2035, and at the same time Indonesia will be included in the group of high-income countries; and avoid the middle-income trap. It is recommended for other researchers to examine various variables that affect the performance of economic growth, GDP, and IPC to complete the results of this study.*

**Keyword:** *economic growth, population growth, GDP, IPC, middle income trap*

### Abstrak

Berdasarkan hasil kajian oleh para ahli dan berbagai lembaga keuangan internasional mengungkapkan bahwa hanya ada kisaran 10% dari negara berpendapatan kelas menengah yang mampu naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Artinya, sebagian besar negara berpendapatan kelas menengah telah terperangkap dalam middle income trap. Besaran IPC merupakan ukuran utama yang dijadikan pedoman untuk mengukur sejauh mana negara dapat terhindar dari middle income trap. Kajian ini bermaksud menakar peluang Indonesia untuk terhindar dari middle income trap. Untuk itu, dalam kajian ini dianalisis 4 variabel makro ekonomi utama yang memiliki hubungan interdependensi, yaitu: pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, GDP, dan IPC. Data 4 variabel makro ekonomi yang dirilis oleh Bank Dunia mulai tahun 1970-2020 dianalisis untuk mendeskripsikan berbagai kecenderungan, perkembangan, dan perubahan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. Dari hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan kinerja perekonomian Indonesia pada masa depan. Dari hasil analisis kinerja makro ekonomi Indonesia yang sudah berjalan, maka kajian ini berhasil memproyeksikan

besaran GDP dan IPC pada tahun yang akan datang. Hasil kajian ini menawarkan skenario 2 dan skenario 3 sebagaimana diulas dalam pembahasan artikel ini. GDP Indonesia diproyeksikan masuk 10 besar dunia pada tahun 2035, dan pada saat yang sama Indonesia akan masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi; sehingga dapat terhindar dari middle income trap. Disarankan kepada peneliti lain untuk mengkaji berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi, GDP, dan IPC untuk melengkapi hasil kajian ini..

**Kata Kunci:** pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, GDP, IPC, middle income trap

## Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia; banyak pihak yang mulai menyuarakan tentang potensi ancaman *middle income trap* yang tidak menutup kemungkinan akan dialami oleh Indonesia. *Middle income trap* adalah suatu keadaan dimana sebuah negara tidak mampu naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah menuju kelompok negara berpendapatan tinggi (Doner dan Schneider, 2016; Paus,2017). Dengan mencermati kinerja makro ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, apakah Indonesia dapat terhindar dari ancaman *middle income trap*?

Sebagaimana diketahui, Merujuk klasifikasi yang dirilis oleh Bank Dunia sebagaimana dipublikasikan pada laman datahelpdesk.worldbank.org, suatu negara dikategorikan dalam kelompok pendapatan rendah jika memiliki pendapatan per kapita (IPC) kurang dari \$1.045. Negara termasuk dalam kategori berpendapatan menengah bawah jika memiliki IPC \$1.046 sampai dengan \$4.095. Negara termasuk dalam kelompok pendapatan menengah tinggi jika memiliki IPC \$4.096 sampai dengan \$12.695. Dan sebuah negara akan masuk dalam kelompok pendapatan tinggi jika memiliki IPC \$12.696 atau lebih (Gill dan Kharas,2007; Doner dan Schneider, 2016).

Istilah *middle income trap* dipopulerkan oleh Gill dan Kharas (2007) dalam kajiannya yang mengungkapkan sebuah fakta bahwa sejak lebih dari setengah abad yang lalu hanya sedikit dari negara-negara yang sudah menyandang predikat kelompok berpendapatan menengah tetapi tidak mampu naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Laporan World Bank (2013) yang berjudul “China 2030” mengungkapkan bahwa dari 101 negara yang masuk kategori negara berpendapatan menengah pada tahun 1960 hanya 13 negara yang naik kelas menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2008.

Istilah *middle income trap* digunakan untuk menggambarkan situasi di mana negara berpenghasilan menengah tidak dapat lagi bersaing dalam menjual berbagai komoditas padat karya yang terstandarisasi pada pasar internasional karena upah yang relatif terlalu tinggi (Filipe, 2012). Pada saat yang sama negara juga tidak mampu bersaing untuk menjual produk dengan nilai tambah yang tinggi dan dalam skala yang besar karena kemampuan produktivitas yang relatif rendah Gill dan Kharas (2007). Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannyamenyebabkan rendahnya peningkatan IPC (Ohno,2009; Paus, 2014).

Mengapa banyak negara berpendapatan menengah mengalami kesulitan untuk bertransformasi menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi? Kajian Gill dan Kharas (2007) mengungkapkan bahwa tingkat produktifitas suatu negara, terutama dalam menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah tinggi merupakan kata kuncinya. Dalam kaitan inilah negara harus

didukung oleh keberadaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, mampu berinovasi, memiliki spirit entrepreneurship yang kuat, dan berwawasan global.

Globalisasi yang dipicu oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sejatinya memberikan peluang yang sama kepada semua negara untuk mengambil peluang pasar di tingkat global. Keterbukaan informasi dan kemudahan berkomunikasi jika mampu dimanfaatkan dengan optimal akan memungkinkan semua negara untuk mengembangkan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pasar global. Disinilah pentingnya bagi negara untuk ikut mengembangkan kemampuan penduduknya agar menguasai pengetahuan dan teknologi, mampu berinovasi, dan bersaing dalam pasar global.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota G20 sejak tahun 1999, yaitu kelompok 20 negara dengan GDP terbesar di dunia. Indonesia masuk sebagai anggota G20 karena dinilai berpengalaman dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda Asia pada akhir tahun 1990-an, mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga memiliki kekuatan pasar yang sangat besar.

Pada tahun 2020 GDP Indonesia bahkan sudah masuk urutan 16 besar dunia, dan jika dilihat dari besaran *power purchasing parity* (PPP) berada di urutan 7 besar dunia. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi pemilik GDP terbesar keempat dunia dengan nilai GDP \$7,3 trilyun pada tahun 2050 (Okezon.com, 6/2/2022). Dengan memperhatikan potensi ekonomi yang sedemikian besar, bagaimanakah peluang Indonesia untuk naik kelas menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi; sehingga terhindar dari *middle income trap*? Bagaimanakah keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan besaran GDP terhadap besaran IPC? Permasalahan inilah yang hendak dikaji dalam artikel ini.

## Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam kajian ini, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasional. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perjalanan Indonesia dalam membangun perekonomian nasional. Ada 4 data utama ekonomi makro yang dijadikan dasar analisis, yaitu data tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, produk domestik bruto (GDP) dan data tentang pendapatan per kapita (IPC) tahun 1967-2020 yang dirilis oleh Bank Dunia. Empat data makro ekonomi inilah yang secara langsung akan menjadi ukuran utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Analisis korelasional digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan GDP terhadap IPC. Untuk menganalisis korelasi antar variabel tersebut digunakan perangkat lunak SPSS versi 26.

Data-data makro ekonomi tersebut dirilis oleh Bank Dunia (<https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>) digunakan sebagai dasar analisis dalam kajian ini. Sedangkan data kependudukan diambil dari laporan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS & Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas (2018).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Napak Tilas Perekonomian Indonesia Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi, GDP, dan IPC

Pada bagian ini diuraikan tentang perjalanan perekonomian Indonesia dengan menggunakan data makro ekonomi Indonesia tahun 1967-2020 yang dirilis oleh bank dunia (<https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>). Beberapa saat setelah dinyatakan merdeka pada tahun 1945, perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia lebih banyak diwarnai dengan berbagai isu politik dan keamanan. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, maka bisa dimaklumi jika konsentrasi pemerintah lebih banyak dicurahkan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Tetapi pada saat yang sama, politik konfrontasi dengan kelompok negara lain lebih banyak mewarnai kehidupan berbangsa, misalnya konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. *“Go to hell with your aid”*, adalah pernyataan konfrontatif paling populer pada saat itu. Sebagai negara yang baru merdeka dan nyaris baru mulai membangun, pemerintah pada saat itu justru merasa bangga karena mampu berkata tidak kepada negara-negara barat yang hendak membantu untuk membangun perekonomian Indonesia. Kegiatan pembangunan ekonomi pada saat itu seperti bukan menjadi agenda utama. Puncaknya ditandai dengan adanya peristiwa politik paling kelam dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1965 yang kemudian diikuti dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno.

Setelah Pemerintah Orde Baru berkuasa pasca peristiwa politik tahun 1965, kegiatan pembangunan ekonomi menjadi agenda utama. Jika pada era sebelumnya pemerintah menyatakan menolak bantuan negara-negara barat, maka pada era Pemerintah Orde Baru lebih banyak membuka pintu kepada negara barat dan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pembangunan ekonomi menjadi jargon utama dari pemerintahan orde baru, sehingga kabinet yang dibentuk oleh pemerintah pun diberi nama “Kabinet Pembangunan”. Nama “Kabinet Pembangunan” ini bahkan terus dipertahankan sampai menjelang berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru.

Keputusan Pemerintah Orde Baru untuk lebih fokus pada pembangunan ekonomi terbukti langsung memberikan dampak instan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana terlihat pada tabel 1, jika pada tahun 1967 pertumbuhan ekonomi hanya 1,38%; maka pada tahun 1968 ketika Pemerintah Orde Baru mulai berkuasa tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 10,91%. Meskipun berfluktuasi, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2 tahun awal berkuasa rata-rata 8,86%.

**Tabel 1.** Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, GDP dan IPC Indonesia 1967-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	GDP (\$)	IPC (\$)	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	GDP (\$)	IPC (\$)
1967	1,38	5.667.756.644	53	1994	7,53	176.892.143.931	912
1968	10,91	7.076.465.295	65	1995	8,22	202.132.028.723	1.026
1969	6,82	8.337.423.312	74	1996	7,81	227.369.679.374	1.137
1970	7,55	9.150.684.931	79	1997	4,69	215.748.998.609	1.063
1971	7,02	9.333.536.359	79	1998	-13,12	95.445.547.872	463
1972	7,03	10.997.590.361	90	1999	0,79	140.001.351.215	671
1973	8,10	16.273.253.012	131	2000	4,92	165.021.012.077	780
1974	7,63	25.802.409.638	202	2001	3,64	160.446.947.784	748
1975	4,97	30.463.855.421	233	2002	4,49	195.660.611.165	900
1976	6,88	37.269.156.626	278	2003	4,78	234.772.463.823	1.065
1977	8,76	45.808.915.662	333	2004	5,03	256.836.875.295	1.150
1978	6,76	51.455.719.099	365	2005	5,69	285.868.618.224	1.263
1979	7,32	51.400.186.379	356	2006	5,50	364.570.514.304	1.589
1980	9,88	72.482.337.370	491	2007	6,34	432.216.737.774	1.860
1981	7,92	85.518.233.450	566	2008	6,01	510.228.634.992	2.166
1982	2,24	90.158.449.307	583	2009	4,62	539.580.085.612	2.261
1983	4,19	81.052.283.404	512	2010	6,22	755.094.160.363	3.122
1984	6,97	84.853.699.994	525	2011	6,16	892.969.107.923	3.643
1985	2,46	85.289.491.750	516	2012	6,03	917.869.910.105	3.694
1986	5,87	79.954.072.569	474	2013	5,55	912.524.136.718	3.623
1987	4,92	75.929.617.576	442	2014	5,00	890.814.755.233	3.491
1988	5,78	84.300.174.477	481	2015	4,87	860.854.235.065	3.331
1989	7,45	94.451.427.898	530	2016	5,03	931.877.364.177	3.562
1990	7,24	106.140.727.357	585	2017	5,06	1.015.618.742.565	3.837
1991	6,91	116.621.996.217	631	2018	5,17	1.042.271.531.011	3.893
1992	6,49	128.026.966.579	681	2019	5,01	1.119.091.259.074	4.135
1993	6,49	158.006.700.301	827	2020	-2,06	1.058.423.838.345	3.869

**Sumber:** <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>

Selanjutnya selama 10 tahun Pemerintah Orde Baru berkuasa (1969-1978) rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7,15%. GDP meningkat sangat signifikan, dari \$8.337.423.312 (1969) menjadi \$51.455.719.099 (1978), atau selama 10 tahun meningkat 517%. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun meningkat dari \$74 (1969) menjadi \$365 (1978). Pada periode ini rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah \$186,4.

Pada dasawarsa kedua Pemerintah Orde Baru berkuasa (1979-1988), rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,75%. Pada periode ini, perekonomian Indonesia sangat berfluktuasi, yang menunjukkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap berbagai guncangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Akibatnya, GDP Indonesia pun selama 10 tahun dalam periode ini naik-turun mengikuti guncangan ekonomi yang sedang terjadi. GDP tahun 1979 mencapai \$51.400.186.379 menjadi \$84.300.174.477, atau selama 10 tahun meningkat 64%. Oleh karena itu, pendapatan per kapita penduduk Indonesia pun juga sangat berfluktuasi dalam periode ini,

namun meningkat dari \$356 (1979) menjadi \$481 (1988). Pada periode ini, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah \$494,6.

Pada dasawarsa ketiga Pemerintah Orde Baru berkuasa (1989-1998) ditandai dengan adanya peristiwa krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998. Sebelum terjadi krisis ekonomi, GDP Indonesia mencapai \$94.451.427.898 (1989) dan \$215.748.998.609 (1997), atau naik 128%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 1989-1997 adalah 6,98%, dengan rata-rata pendapatan per kapita pada periode yang sama mencapai \$821,3. Tetapi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi -13,12%, GDP anjlok dari \$215.748.998.609 (1997) menjadi \$95.445.547.872, atau berkurang sebanyak 55,7%. Pendapatan per kapita pun ikut terjun bebas dari \$1.063 pada tahun 1997 menjadi \$463 pada tahun 1998, atau terpankas sebesar 56,4%. Krisis ekonomi dan moneter yang memangkas lebih dari 50% pendapatan per kapita penduduk menyebabkan krisis kepercayaan kepada pemerintah, sehingga setelah berkuasa selama 3 dasawarsa Pemerintah Orde Baru pun tumbang.

Meskipun mengakhiri kekuasaan dengan cerita kelam, tetapi setidaknya ada satu hal yang patut dicatat selama Pemerintah Orde Baru berkuasa selama 30 tahun; yaitu keberhasilannya meningkatkan pendapatan per kapita dari \$65 pada tahun 1968 menjadi \$1.063 pada tahun 1997. Data ini sangat bermakna, karena setelah melaksanakan pembangunan ekonomi selama 30 tahun pasca krisis politik tahun 1965, Indonesia baru naik kelas dari kelompok negara berpendapatan rendah menuju kelompok negara berpendapatan menengah bawah.

Sayangnya, satu tahun berikutnya sejarah seperti kembali berulang, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang sangat parah, dan kemudian merembet ke krisis sosial, politik, dan keamanan. Hal ini langsung berdampak instan pada turunnya IPC ke level \$463 pada tahun 1998. Pondasi perekonomian Indonesia terlihat sangat rapuh, yang membuat IPC Indonesia terkoreksi sebesar 56,4%. Hal ini berarti Indonesia kembali turun kelas ke kelompok negara berpendapatan rendah. Predikat sebagai negara berpendapatan rendah harus disandang oleh Indonesia selama 5 tahun pasca krisis 1998. Baru pada tahun 2003, Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah dengan IPC sebesar \$1.065.

Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 relatif tidak ada peristiwa besar di dalam negeri yang dianggap mengganggu kegiatan pembangunan ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2008, perekonomian Indonesia relatif tahan menghadapi guncangan, sehingga dalam periode ini pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5%, GDP meningkat dari \$256.836.875.295 (2004) menjadi \$1.119.091.259.074 (2019), atau selama 15 tahun meningkat 335%. IPC Indonesia pun meningkat signifikan, dari \$1.150 (2004) menjadi \$4.135 (2019), atau meningkat 259%.

Dengan memperhatikan besaran IPC pada tahun 2019, maka Indonesia berhasil naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah bawah menjadi kelompok negara berpendapatan menengah atas. Artinya, diperlukan waktu 22 tahun bagi Indonesia untuk bisa naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah bawah menuju negara berpendapatan menengah atas. Atau, jika dihitung sejak Indonesia focus melaksanakan pembangunan ekonomi pada tahun 1967; diperlukan waktu lebih dari 50 tahun bagi Indonesia untuk mencapai kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Ketika harapan begitu melambung tinggi agar Indonesia terus konsisten meningkatkan besaran IPC agar mampu naik kelas menuju kelompok negara berpendapatan tinggi, tiba-tiba pada awal 2020 ada pandemic COVID-19 yang melanda dunia. Sebagaimana bisa diprediksi, pandemi yang melanda dunia nyaris menghentikan aktifitas ekonomi berbagai negara di dunia. Sehingga pada tahun yang sama IPC Indonesia kembali turun ke level \$3.869. Artinya, pada tahun 2020 Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Selengkapnya lihat tabel 1).

Beruntung Indonesia mampu melewati pandemic relatif mulus, sehingga pada tahun 2021 aktifitas ekonomi kembali bergerak. Kondisi ini langsung berdampak positif pada kinerja perekonomian Indonesia. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa sampai dengan triwulan IV 2021 PDB Indonesia berdasarkan harga dasar berlaku mencapai Rp. 16.970,8 trilyun, tingkat pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3,69%; sehingga diketahui besarnya IPC pada periode yang sama sebesar Rp.62,2 juta; atau \$4.350 (BPS,2021). Artinya, sejak tahun 2021 Indonesia kembali masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.

Jika menggunakan ukuran waktu Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah pada tahun 1996, maka Indonesia sudah 26 tahun berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah, baik menengah bawah maupun menengah atas. Agar masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi, maka Indonesia harus mengejar tingkat IPC minimal \$12.696. Kapan, dan bagaimana kemampuan Indonesia untuk mencapai IPC batas minimal sebagai negara berpendapatan tinggi? Analisis di bawah ini berusaha untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut.

## **B. Potensi Indonesia Terhindar dari *Middle Income Trap***

Apakah Indonesia dapat terhindar dari jebakan pendapatan kelas menengah (*middle income trap*), dengan kata lain naik kelas, dari kelompok negara berpendapatan menengah menuju kelompok negara berpendapatan tinggi? Pertanyaan inilah yang banyak disuarakan oleh para akademisi, para penggiat sosial, termasuk dari kalangan pemerintah sendiri. Harapannya tentu saja Indonesia akan dapat naik kelas menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi di masa depan, mengingat begitu besarnya potensi ekonomi yang ada. Indonesia tidak saja sebagai negara dengan penduduk terbesar di kawasan Asean, dan hal ini merupakan salah satu variabel utama yang akan menggerakkan perekonomian nasional. Lebih dari itu, Indonesia juga kaya sumber alam yang sangat beragam, sehingga merupakan negara penghasil komoditas utama yang dibutuhkan oleh perekonomian global.

### **1. Korelasi antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan GDP terhadap IPC**

Untuk menganalisis potensi Indonesia agar terhindar dari *middle income trap*, atau dapat naik kelas sebagai kelompok negara berpendapatan ekonomi tinggi; dalam tulisan ini akan digunakan 3 data makro ekonomi utama yang dirilis oleh Bank Dunia, yaitu: data pertumbuhan ekonomi, GDP, dan IPC; sebagaimana disajikan dalam tabel 1. Selain itu, juga digunakan data tentang proyeksi jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2045, sebagaimana dirilis oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 2018.

Tiga data makro ekonomi dan data kependudukan inilah yang sangat menentukan besar kecilnya IPC. Hasil uji statistik yang mengkorelasikan antara pertumbuhan ekonomi, GDP, dan tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap IPC menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan (lihat tabel 2).

**Tabel 2.** Korelasi antar variabel pembentuk IPC

	Variabel Terukur	Log-IPC	Log-Pertumb. Ekonomi	Log-Pertumb. Penduduk	Log-GDP
Pearson Correlation	Log-IPC	1,00	-		
	Log-Pertumb. Ekonomi	0,461	1,00	-	
	Log-Pertumb. Penduduk	-0,655	-0,166	1,00	-
	Log-GDP	0,999	0,449	-0,676	1,00
Sig	Log-IPC	-			
	Log-Pertumb. Ekonomi	0,013	-		
	Log-Pertumb. Penduduk	0,000	0,225	-	
	Log-GDP	0,000	0,016	0,000	-

**Sumber:** Data diolah peneliti, data mentah diambil dari <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>

Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif signifikan terhadap IPC, dengan koefisien korelasi  $r = 0,461$  ( $p = 0,013$ ). GDP berkorelasi positif signifikan terhadap IPC, dengan koefisien korelasi  $r = 0,999$  ( $p = 0,000$ ). Pertumbuhan penduduk berkorelasi negatif signifikan terhadap IPC, dengan koefisien korelasi  $r = -0,655$  ( $p = 0,000$ ). Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif signifikan terhadap GDP, dengan koefisien korelasi  $r = 0,449$  ( $p = 0,016$ ). Dan selanjutnya pertumbuhan penduduk berkorelasi negatif signifikan terhadap GDP, dengan koefisien korelasi  $r = -0,676$  ( $p = 0,000$ ).

Hasil uji statistik tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, akan semakin tinggi pula GDP dan IPC; dan semakin tinggi GDP akan semakin tinggi pula IPC. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan GDP merupakan dua variabel yang sangat menentukan besar kecilnya IPC. Hal ini menunjukkan bahwa untuk agar IPC dapat terus menguat dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi dan GDP juga harus diperkuat dari tahun ke tahun. Negara harus mengupayakan berbagai faktor yang dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan GDP, seperti: iklim investasi yang kondusif dan daya saing bangsa yang terus menguat dari waktu ke waktu.

Hasil uji statistik juga mengungkapkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin rendah GDP dan IPC. Hal ini bisa dipahami karena jumlah penduduk yang besar akan menjadi komponen pembagi bagi GDP, sehingga semakin besar jumlah penduduk akan semakin menekan besaran IPC. Jika prosentase pertumbuhan GDP lebih besar daripada prosentase pertumbuhan penduduk, maka IPC akan meningkat; begitu pula sebaliknya. Jika prosentase pertumbuhan GDP setara dengan prosentase pertumbuhan penduduk, maka IPC akan stagnan. Dengan kata lain, agar IPC terus meningkat dari waktu ke waktu, maka prosentase pertumbuhan GDP harus lebih besar dibandingkan dengan prosentase pertumbuhan penduduk.

Hasil analisis juga menunjukkan ternyata pertumbuhan penduduk juga terbukti membebani GDP. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang besar belum sepenuhnya berkontribusi positif

bagi pembentukan GDP. Hal ini bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti penguasaan pengetahuan dan skill penduduk yang rendah sehingga berdampak pada tingkat produktifitas yang rendah. Pertumbuhan penduduk yang besar juga berpotensi menciptakan rasio ketergantungan penduduk yang besar, yaitu ketergantungan penduduk yang tidak bekerja kepada penduduk yang bekerja; dan hal ini berpotensi menekan IPC.

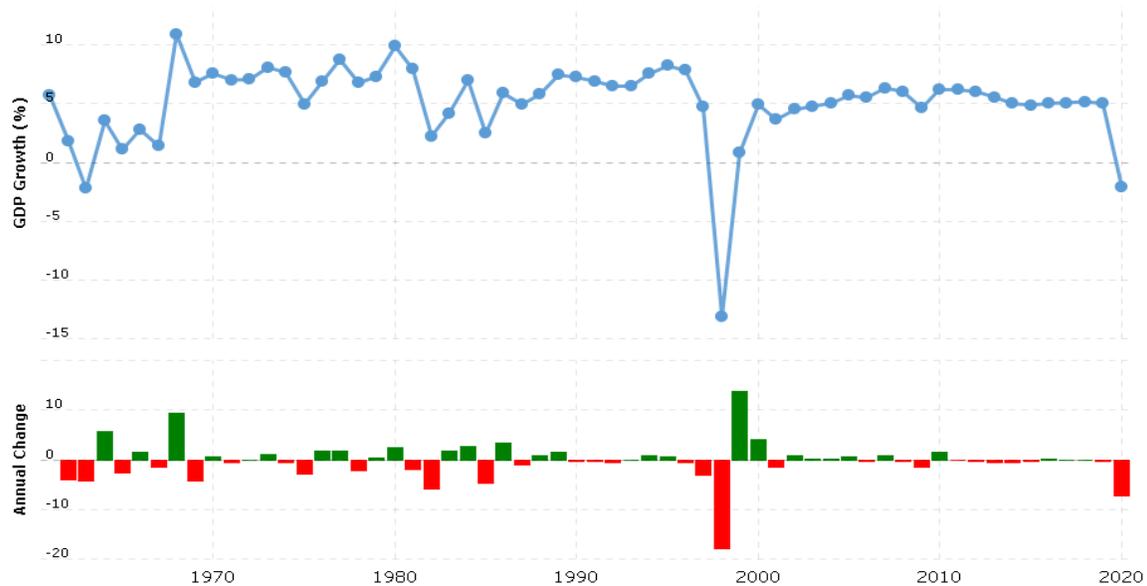
Data yang dirilis oleh Bank Dunia mengungkapkan dalam 50 tahun terakhir pertumbuhan penduduk Indonesia menurun signifikan. Jika pertumbuhan penduduk pada tahun 1970 adalah 2,679%, maka pada tahun 2020 bisa diturunkan ke 1,065%; atau selama 50 tahun terakhir pertumbuhan penduduk turun sebesar 60,24%. Data pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa mulai 1970 sampai dengan 2020 pertumbuhan penduduk di Indonesia terus menurun secara konsisten (<https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>). Indonesia telah berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk sebagai salah satu variabel utama yang menekan IPC. Dengan kata lain, Indonesia berpotensi besar untuk terhindar dari *middle income trap* jika dianalisis dari pertumbuhan penduduk.

## **2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2020, dan proyeksi GDP Indonesia 2021-2040**

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penting yang akan menentukan besarnya GDP dan IPC. Apalagi dalam khasanah kajian teori ekonomi makro, angka pertumbuhan ekonomi sesungguhnya juga didapatkan dengan mengkaji perubahan GDP dari tahun ke tahun, atau dengan membandingkan GDP pada tahun yang sedang berjalan dengan GDP tahun sebelumnya dikalikan 100%. Dengan kata lain, ada hubungan interdependensi antara pertumbuhan ekonomi dan GDP. Jika GDP meningkat dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat dari tahun ke tahun, dengan catatan *ceteris paribus*.

Catatan *ceteris paribus* ini perlu dikemukakan karena seringkali terjadi peristiwa luar biasa yang sepenuhnya tidak bisa dikendalikan oleh sebuah negara; baik di bidang ekonomi, politik, keamanan nasional, dan sosial. Krisis ekonomi dan moneter, yang kemudian menjalar ke krisis politik yang dialami Indonesia pada tahun 1998 merupakan contoh peristiwa luar biasa yang menginterupsi kinerja perekonomian nasional pada saat itu. Demikian halnya dengan peristiwa pandemic COVID-19 yang menlanda seluruh negara di dunia juga menurunkan kinerja ekonomi yang sangat dalam. Peristiwa luar biasa sebagaimana dicontohkan dianggap sebagai *outlier data* sehingga untuk kepentingan analisis dalam kajian ini dua contoh peristiwa tersebut diabaikan.

Bagaimanakah kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020? Data Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Gambar 1 menjelaskan bahwa sebelum terjadi peristiwa krisis ekonomi dan moneter tahun 1998, terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan 1997 Indonesia mampu mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi rata-rata pada kisaran +/-7% per tahun. Dalam periode ini terlihat adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi, yang sesungguhnya hal ini mengindikasikan adanya kerentanan perekonomian nasional terhadap berbagai guncangan yang disebabkan oleh aspek ekonomi maupun ekonomi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.



Sumber: <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>  
[www.macrotrends.net/countries/IDN/Indonesia/gdp-growth-rate](http://www.macrotrends.net/countries/IDN/Indonesia/gdp-growth-rate)

**Gambar 1:** Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sampai 2020

Indonesia diakui dunia mampu mengatasi krisis ekonomi dan moneter yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi sampai -13,12%. Setahun setelah krisis, atau mulai tahun 1999; Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,79%. Sejak tahun 2000 sampai 2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 5,26%. Sebagai catatan, Indonesia mampu menghindarkan diri dari krisis ekonomi global 2008 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,01%, sebelum akhirnya kembali mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi global. Pada tahun 2000 -2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil pada kisaran 5%. Pada periode 2000-2019 tampak tidak terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi, meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih kecil 2% jika dibandingkan dengan periode 1970-1997 yang rata-rata tumbuh 7%.

Dengan memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu tumbuh positif pada kisaran 7% (periode 1970-1997) dan kisaran 5% (periode 2000-2019) diluar *data outlier*, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk terus meningkatkan besaran GDP. Jika Indonesia konsisten untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat pada periode 2000-2019, maka akan dapat diproyeksikan kapan Indonesia akan masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi, atau terhindar dari *middle income trap*. Dengan demikian dapat diprediksi besar GDP Indonesia dengan menggunakan skenario 1 dengan asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan stabil pada kisaran 5%.

**Tabel 3.** Perkembangan GDP Indonesia Tahun 2000-2020

Tahun	GDP (milyar \$)	Perubahan GDP (%)	Total Perubahan GDP Dalam 10 Tahun (%)
2000	165.021	-	
2001	160.446	-2.77237	
2002	195.66	21.94757	
2003	234.772	19.98978	
2004	256.836	9.398054	129.7547
2005	285.868	11.30371	
2006	364.57	27.53089	
2007	432.216	18.55501	
2008	510.228	18.04931	
2009	539.58	5.752722	
2010	755.094	39.94107	
2011	892.969	18.25932	
2012	917.869	2.788451	
2013	912.524	-0.58233	
2014	890.814	-2.37912	81.89459
2015	860.854	-3.36322	
2016	931.877	8.250296	
2017	1015.618	8.986272	
2018	1042.471	2.644006	
2019	1119.091	7.349845	
2020	1058.423	-5.42119	
A. Rerata perubahan GDP 2000-2019			10,5824
B. Rerata perubahan GDP 2010-2019 (Skenario 2)			8,1894
Rerata akumulasi perubahan GDP 2000-2019 dan GDP 2010-2019 (A+B/2) (Skenario 3)			9,3859

**Sumber:** Data diolah peneliti, Data diambil dari <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil terbukti mampu meningkatkan besaran GDP. Perkembangan GDP Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 3 digunakan sebagai dasar memprediksi GDP Indonesia di masa depan dengan menggunakan skenario 2 dan skenario 3.

Meskipun sempat mengalami penurunan GDP pada berbagai tahun yang berbeda, namun secara keseluruhan antara tahun 2000-2019 bisa digambarkan adanya peningkatan GDP yang konsisten selama 20 tahun terakhir (lihat gambar 2). Data sebagaimana disajikan pada tabel 3 menunjukkan total perubahan GDP per satu dasawarsa. Pada dasawarsa pertama (2000-2009) total perubahan GDP adalah +129,7547%, sedangkan dasawarsa kedua (2010-2019) total perubahan GDP adalah +81,8945%. Sehingga rata-rata perubahan GDP pada periode 2000-2019 adalah sebesar 105,824%. Rata-rata perubahan GDP periode tahun 2000-2019 sebesar 10,5824% per tahun, sedangkan untuk periode 2010-2019 sebesar 8,1894% per tahun. Jika rerata

perubahan GDP periode 2000-2019 digabung dengan rerata perubahan GDP periode 2010-2019, maka diperoleh rerata perubahan GDP sebesar 9,3859% per tahun.

Data perubahan GDP yang sudah terjadi dalam perekonomian Indonesia inilah yang digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan besaran GDP untuk durasi waktu yang sama tahun berikutnya dengan menggunakan patokan besar GDP pada tahun terakhir yang dicatatkan oleh Indonesia.



**Sumber:** Data Bank Dunia, <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>

**Gambar 2.** Perkembangan GDP Indonesia Tahun 2000-2019

Berdasarkan data-data di atas, maka dapat diproyeksikan berbagai skenario besaran GDP pada periode 2021-2040 dengan menggunakan 3 asumsi: (1) asumsi pertumbuhan ekonomi konstan rerata 5% per tahun, (2) asumsi gabungan rerata perubahan GDP tahun 2000-2019 dan perubahan GDP tahun 2010-2019 sebesar 9,3859% per tahun, dan (3) rerata perubahan GDP 10 tahun terakhir (2010-2019) sebesar 8,1894% per tahun; sebagaimana tampak pada tabel 4.

**Tabel 4.** Proyeksi GDP Indonesia 2021-2040

Tahun	Proyeksi GDP Berdasarkan basis GDP 2020 = \$1.058,423 (dalam milyar \$)		
	Skenario 1: Rerata Pertumbuhan Ekonomi 5%/tahun	Skenario 2: Perubahan GDP sebesar 9,3859%/tahun	Skenario 3: Perubahan GDP sebesar 8,1894%/tahun
2021	1.111,34	1.157,76	1.145,10
2022	1.166,91	1.266,43	1.238,88
2023	1.225,25	1.385,30	1.340,33
2024	1.286,52	1.515,32	1.450,10
2025	1.350,84	1.657,55	1.568,85
2026	1.418,38	1.813,12	1.697,33
2027	1.489,30	1.983,30	1.836,33
2028	1.563,77	2.169,45	1.986,72
2029	1.641,96	2.373,07	2.149,42
2030	1.724,06	2.595,80	2.325,44
2031	1.810,26	2.839,45	2.515,88
2032	1.900,77	3.105,95	2.721,92
2033	1.995,81	3.397,47	2.944,83
2034	2.095,60	3.716,36	3.185,99
2035	2.200,38	4.065,17	3.446,91
2036	2310,40	4.446,73	3.729,19
2037	2425,92	4.864,09	4.034,58
2038	2547,22	5.320,63	4.364,99
2039	2674,58	5.820,02	4.722,46
2040	2808,31	6.366,28	5.109,20

**Sumber:** Data diolah peneliti

GDP Indonesia pada 2040 jika menggunakan proyeksi skenario 1 diprediksi sebesar \$2.808,31 milyar, jika menggunakan proyeksi skenario 2 sebesar \$6.366,28 milyar, dan jika menggunakan proyeksi skenario 3 sebesar \$5.109,20 milyar. Untuk menimbang apakah proyeksi dalam kajian ini realistis atau tidak, maka perlu ada data pembandingan dari Lembaga resmi pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam orasi ilmiahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (26/9/2017) dengan tema “Visi Indonesia 2045” (<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPaparanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf>).

Dengan mengutip estimasi dari *Price Waterhouse Coopers* (2017) Kementerian PPN/Bappenas (2017) memaparkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia menduduki peringkat 9 besar dunia dengan nilai GDP berdasarkan *market exchange rate* sebesar \$2.449 milyar. Nilai GDP yang diperkirakan oleh Kementerian PPN/Bappenas ini tidak berbeda jauh dengan hasil proyeksi skenario 2 dan skenario 3, masing-masing sebesar \$2.595,80 milyar dan \$2.325,44 milyar. Nilai titik tengah dari proyeksi skenario 2 dan skenario 3 adalah \$2.460,62 milyar. Hasil proyeksi skenario 2, skenario 3, dan titik tengah antara skenario 2 dan skenario 3 juga memposisikan Indonesia pada peringkat 9 besar dunia. Dengan demikian hasil proyeksi skenario 2 dan skenario 3 dalam kajian ini dapat digunakan untuk memperkirakan GDP Indonesia di masa depan.

### 3. Proyeksi IPC Indonesia 2021-2040

Tabel 5 memproyeksikan besar IPC Indonesia tahun 2021-2040 dengan menggunakan 3 skenario. Skenario 1 memproyeksikan IPC Indonesia dengan asumsi rerata pertumbuhan ekonomi 5% per tahun. Skenario 2 memproyeksikan IPC Indonesia dengan asumsi rerata perubahan nilai GDP 9,3859% per tahun. Skenario 3 memproyeksikan IPC Indonesia dengan asumsi rerata perubahan nilai GDP 8,1894% per tahun. Proyeksi penduduk Indonesia 2015 -2045 hasil SUPAS 2015 yang dirilis oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS & Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas (2018) juga digunakan sebagai dasar penghitungan IPC dalam kajian ini.

**Tabel 5.** Proyeksi IPC Indonesia 2021-2040

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia (jiwa)	Proyeksi IPC Indonesia (GDP/Jumlah Penduduk) (\$ per tahun)		
		Skenario 1:	Skenario 2:	Skenario 3:
		Rerata Pertumbuhan Ekonomi 5%	Perubahan GDP sebesar 9,3859%/tahun	Perubahan GDP sebesar 8,1894%/tahun
2021	272.248.500	4.082	4.252	4.206
2022	274.859.100	4.245	4.608	4.507
2023	277.432.400	4.416	4.993	4.831
2024	279.965.200	4.595	5.412	5.179
2025	282.454.500	4.782	5.868	5.554
2026	284.895.900	4.978	6.364	5.957
2027	287.285.300	5.184	6.903	6.392
2028	289.620.200	5.399	7.490	6.859
2029	281.897.900	5.625	8.418	7.624
2030	294.116.100	5.861	8.825	7.906
2031	296.271.300	6.110	9.583	8.491
2032	298.380.400	6.370	10.040	9.122
2033	300.381.300	6.644	11.310	9.803
2034	302.332.200	6.931	12.292	10.538
2035	304.211.900	7.233	13.363	11.330
2036	306.019.300	7.549	14.530	12.186
2037	307.752.900	7.882	15.805	13.109
2038	309.411.900	8.232	17.196	14.107
2039	310.996.200	8600	18.714	15.185
2040	312.505.600	8.986	20.371	16.349

**Sumber:** Data diolah peneliti

IPC merupakan data utama yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengelompok negara, apakah masuk dalam kelompok berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi. Jika IPC sebuah negara secara konsisten naik dari tahun ke tahun, maka negara tersebut berpotensi untuk naik kelas ke kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi prosentase kenaikan IPC dari tahun ke tahun, maka waktu yang dibutuhkan untuk menuju kelompok negara berpendapatan tinggi akan semakin singkat; begitu pula sebaliknya. Jika IPC sebuah negara berfluktuasi atau naik dan turun di sepanjang tahun, maka negara tersebut akan mengalami tingkat stagnasi

IPC. Artinya, besaran IPC akan bergerak lamban dari tahun ke tahun. Jika stagnasi itu terlalu dalam, maka besaran IPC akan berhenti di titik jumlah tertentu. Negara akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan IPC-nya. Hal inilah yang menjadi tanda sebuah negara berpotensi besar untuk terperangkap dalam fenomena *middle income trap*.

Bagaimana potensi Indonesia untuk terhindar dari *middle income trap*? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja harus diproyeksikan besarnya IPC Indonesia di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil proyeksi GDP 2021-2040 dengan jumlah penduduk Indonesia di periode yang sama.

Berdasarkan proyeksi IPC Indonesia sebagaimana tampak pada tabel 4, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika menggunakan skenario 1 maka sampai dengan tahun 2040 Indonesia masih dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Sesuai dengan penghitungan maka Indonesia akan masuk dalam kategorinegara berpendapatan tinggi pada tahun 2047 dengan perkiraan IPC mencapai \$12.311. Dengan kata lain, Indonesia dapat terhindar dari *middle income trap* pada tahun 2047, atau 25 tahun yang akan datang. Skenario ini kemungkinan besar dapat diwujudkan, dengan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan konsisten pada kisaran 5% dalam waktu 25 tahun kedepan.
2. Jika menggunakan skenario 2 maka sampai dengan tahun 2034 Indonesia akan masuk kategori negara berpendapatan tinggi dengan perkiraan IPC mencapai \$12.292. Dengan kata lain, Indonesia dapat terhindar dari *middle income trap* pada tahun 2034, atau 12 tahun yang akan datang.
3. Jika menggunakan skenario 3 maka sampai dengan tahun 2036 Indonesia akan masuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi, dengan perkiraan IPC mencapai \$12.186. Dengan kata lain, Indonesia dapat terhindar dari *middle income trap* pada tahun 2036, atau 14 tahun yang akan datang.

Untuk menimbang apakah hasil proyeksi IPC Indonesia ini realistis atau tidak, maka dapat dikomparasikan dengan estimasi IPC Indonesia yang dirilis oleh lembaga resmi pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas (2017) memaparkan, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tinggi, Indonesia diperkirakan akan masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2035, dengan estimasi IPC sebesar \$14.214.

Hasil proyeksi dalam kajian ini mengungkapkan, jika menggunakan skenario 2; Indonesia diperkirakan akan masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2034 dengan nilai IPC sebesar \$12.292. Jika menggunakan skenario 3, Indonesia diperkirakan akan masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dengan nilai IPC sebesar \$12.186. Jika menggunakan satuan waktu kapan Indonesia akan masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi, maka titik tengah antara skenario 2 dan skenario 3 dalam kajian ini adalah sama dengan prediksi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu tahun 2035. Dengan demikian skenario 2 dan skenario 3 dalam kajian ini dapat dijadikan pedoman untuk memproyeksikan besaran IPC pada masa depan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disajikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan data-data makro ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun yang sudah berjalan, terutama berkaitan dengan data pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan GDP; maka dapat diproyeksikan besarnya IPC dengan menggunakan skenario 2 dan skenario 3 yang ditawarkan dalam kajian ini. Berdasarkan skenario tersebut, maka Indonesia dapat masuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi antara tahun 2034-2036. Kisaran IPC Indonesia pada rentang waktu tersebut diperkirakan sebesar \$12.186 sampai dengan \$14.530. Dengan kata lain, Indonesia berpotensi untuk terhindar dari *middle income trap* pada rentang waktu tersebut.
2. GDP merupakan variabel utama yang berhubungan erat dengan IPC. Hal ini wajar, karena IPC merupakan hasil pembagian GDP dengan jumlah penduduk. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan variabel kedua yang berhubungan erat dengan IPC. Tinggi rendahnya jumlah penduduk juga berhubungan erat dengan besaran IPC. Indonesia terbukti berhasil mengendalikan jumlah penduduk, sebagaimana terlihat dalam data yang dirilis oleh Bank Dunia. Dengan demikian, dilihat dari prestasi Indonesia dalam mengendalikan jumlah penduduk, maka Indonesia berpotensi besar untuk terhindar dari *middle income trap*.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel ketiga yang berhubungan erat dengan GDP dan IPC. Dengan memperhatikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 20 tahun terakhir (2000-2019), maka dapat diketahui rerata pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%. Jika kecenderungan pertumbuhan ekonomi ini digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan GDP dan IPC, maka Indonesia berpotensi besar untuk terhindar dari *middle income trap*; meski diperkirakan perlu waktu 25 tahun untuk naik kelas menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi.

Berdasarkan simpulan yang disajikan dalam kajian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Indonesia harus berusaha keras agar dalam beberapa tahun ke depan tingkat pertumbuhan ekonomi dijaga pada kisaran 5% atau lebih. Tentu banyak factor yang mempengaruhi terwujudnya target ini. Untuk itu disarankan kepada peneliti lain untuk mengkaji berbagai variabel yang berpengaruh dominan bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
2. Indonesia harus melanjutkan *trend* GDP yang terus tumbuh positif dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu dikaji berbagai variabel dominan yang mempengaruhi pertumbuhan GDP.
3. Indonesia harus terus menjaga agar IPC terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu dikaji berbagai variabel yang dominan mempengaruhi besaran IPC.

## Referensi

- BPS.2021. *Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02% (y-on-y)*. Dalam: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html>. Diakses 1 Mei 2022.
- Data Makro Ekonomi Indonesia 1967-2020. <https://data.worldbank.org/country/indonesia?locale=id>. Diakses 2 Maret 2022
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS & Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas (Ed.). 2018. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 -2045 Hasil SUPAS 2015 (Edisi Revisi)*. Jakarta: BPS RI
- Doner, R. dan Schneider, B.S. 2016. The Middle Income Trap: More Politics than Economics. *World Politics*, 68 (4), 608–644
- Felipe, J. 2012. *Tracking the Middle-Income Trap: What is it, Who is in it, and Why? (Part 1)*, Asian Development Bank Economics Working Paper Series No. 306, Asian Development Bank
- Gill, I., dan Kharas, H. 2007. *An East Asia Renaissance: Ideas for Economic Growth*. Washington, D.C.: World Bank.
- Indonesia Growth Rate 1961-2022. <https://www.macrotrends.net/countries/IDN/indonesia/gdp-growth-rate>. Diakses 2 Mei 2022
- Kementerian PPN/Bappenas. 2017. *Visi Indonesia 2045. Orasi Ilmiah pada tanggal 26 September 2017*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/BahanPapanMPPN-VisiIndonesia2045-25September2017.pdf>. Diakses 18 April 2022
- Ohno, K. 2009. *The Middle Income Trap. Implications for Industrialization Strategies in East Asia and Africa*. GRIPS Development Forum, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan.
- Paus, E. 2014. *Latin America and the Middle-Income Trap*. Financing for Development Series. ECLAC, United Nations.
- Paus, E. 2017. *Escaping the Middle-Income Trap: Innovate or Perish*. ADBI Working Paper 685. Tokyo: Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/escaping-middle-income-trap-innovate-or-perish>. Diakses 11 Desember 2021
- RI Diprediksi Jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-5 Dunia, Simak 4 Faktanya. Dalam: <https://economy.okezone.com/read/2022/02/05/320/2542861/ri-diprediksi-jadi-negara-ekonomi-terbesar-ke-5-dunia-simak-4-faktanya?page=1> Diakses 2 Juni 2022.
- World Bank. 2013. *China 2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative Society*. Washington, D.C.: World Bank